

PENGARUH POLITIK DESENTRALISASI DAN BUDAYA DAERAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DASAR

Putri Yani Saragih¹, Feby Widya Sari Br Depari², Dita Puspitasari³, Kiki Shandi⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Dasar, Universitas Terbuka

¹putrisrgh04@gmail.com, ²febydepari0@gmail.com,

³ditapuspitasariofficial@gmail.com, ⁴kikishandi31@gmail.com

ABSTRACT

The quality of primary education in Indonesia continues to face major challenges, particularly concerning regional disparities, literacy achievement, and teacher competence. Post-reform decentralization policies granted local governments broad authority over education management, including teacher distribution, budget allocation, and curriculum adjustments tailored to local needs. However, these policies have not fully improved educational quality due to bureaucratic limitations, budget politicization, and fiscal capacity gaps among regions. Meanwhile, local culture plays an ambivalent role. Cultural values such as cooperation, consensus, and traditional wisdom can strengthen character education and contextual learning, while certain practices, such as early marriage, gender bias, or excessive reliance on local languages, hinder school participation. This study employed a literature review method by examining academic sources, national reports, and relevant international studies. The findings reveal that decentralization and local culture exhibit both complementary and conflicting impacts on primary education quality. Their synergy can enhance educational outcomes if managed with transparent governance, data-driven policies, and selective integration of positive cultural values. These results highlight the importance of aligning political decentralization with cultural management to sustainably improve the quality of primary education in Indonesia.

Keywords: *regional culture, local wisdom, quality of basic education, regional autonomy, decentralization politics*

ABSTRAK

Mutu pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kesenjangan antarwilayah, capaian literasi, dan kualitas guru. Politik desentralisasi yang lahir pascareformasi memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan, mulai dari distribusi guru, alokasi anggaran, hingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan mutu pendidikan dasar karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan birokrasi, politisasi anggaran, dan ketimpangan kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, budaya daerah memiliki peran ambivalen. Nilai-

nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kearifan tradisional dapat memperkuat pendidikan karakter dan relevansi pembelajaran, sementara praktik budaya tertentu seperti pernikahan dini, bias gender, atau dominasi bahasa daerah justru menjadi hambatan bagi partisipasi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber akademik, laporan nasional, dan penelitian internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik desentralisasi dan budaya daerah memiliki hubungan yang saling melengkapi sekaligus bertentangan. Sinergi keduanya dapat memperkuat mutu pendidikan bila dikelola dengan tata kelola yang transparan, berbasis data, serta selektif dalam mengintegrasikan nilai budaya positif. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi kebijakan politik dan pengelolaan budaya lokal untuk memperkuat mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan.

Kata Kunci: budaya daerah, kearifan local, mutu pendidikan dasar, otonomi daerah, politik desentralisasi

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam pembangunan bangsa karena berfungsi menyiapkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter, dan kompetitif. Mutu pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar, memiliki posisi strategis karena menjadi pondasi bagi keberlanjutan pembelajaran pada tingkat menengah hingga perguruan tinggi.

Pendidikan dasar bukan hanya sekadar transmisi pengetahuan, melainkan juga pembentukan nilai, sikap, dan keterampilan dasar yang menentukan arah perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, mutu pendidikan dasar menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan

nasional (Bagus Setiawan & Maunah, 2023). Di Indonesia, mutu pendidikan dasar masih menjadi permasalahan serius. Indikator mutu seperti hasil Ujian Nasional (yang kini bertransformasi menjadi Asesmen Nasional), tingkat partisipasi sekolah, serta capaian literasi dan numerasi menunjukkan kesenjangan antarwilayah yang cukup tajam (Nurhuda, 2022).

Daerah perkotaan umumnya memiliki akses lebih baik terhadap guru berkualitas, fasilitas belajar, dan sumber daya pendidikan, sementara daerah pedesaan dan terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur serta rendahnya kualitas tenaga pendidik. Laporan PISA (*Programme for International Student Assessment*) juga menegaskan

bahwa capaian pendidikan dasar di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Persoalan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan dasar tidak hanya ditentukan oleh faktor internal sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya di mana sekolah berada.

Salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah politik desentralisasi. Pasca-reformasi 1998, Indonesia mengadopsi sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan, termasuk pengelolaan anggaran, rekrutmen tenaga pendidik, serta penyusunan program pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Secara teoritis, desentralisasi pendidikan bertujuan mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat, sehingga kebijakan pendidikan lebih responsif terhadap karakteristik daerah. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Perbedaan kapasitas

manajerial antar pemerintah daerah menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan. Ada daerah yang mampu memanfaatkan otonomi untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi tidak sedikit pula daerah yang mengalami stagnasi karena keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan (Sofiani et al., 2024).

Selain faktor politik, budaya daerah juga memegang peran penting dalam menentukan mutu pendidikan dasar. Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keragaman etnis, bahasa, dan kearifan lokal. Budaya tersebut dapat menjadi potensi apabila diintegrasikan dalam pembelajaran, misalnya melalui muatan lokal atau pendidikan berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Nilai-nilai seperti gotong royong, religiusitas, dan kebersamaan dapat memperkuat pendidikan karakter, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung sekolah. Namun, budaya juga bisa menjadi penghambat ketika nilai-nilai tradisional tertentu justru membatasi akses pendidikan, misalnya praktik pernikahan dini, bias gender, atau pandangan yang masih memandang

pendidikan formal sebagai hal yang tidak prioritas. Dengan demikian, budaya daerah berfungsi ganda: sebagai faktor pendukung sekaligus tantangan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan dasar (Durotun Nasihah et al., 2023).

Kajian akademik mengenai desentralisasi pendidikan dan budaya daerah sudah cukup banyak dilakukan, tetapi sebagian besar penelitian cenderung berdiri sendiri. Misalnya, beberapa penelitian menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan meningkatkan fleksibilitas kebijakan daerah, namun juga memperlebar kesenjangan mutu antarwilayah. Di sisi lain, penelitian lain mengkaji integrasi budaya lokal dalam kurikulum sekolah dasar sebagai strategi meningkatkan relevansi pendidikan, terutama di daerah dengan identitas budaya yang kuat (Alimuddin et al., 2025). Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis interaksi antara politik desentralisasi dan budaya daerah terhadap mutu pendidikan dasar masih jarang ditemukan. Padahal, kebijakan pendidikan di tingkat daerah tidak pernah berdiri di ruang hampa; ia selalu berinteraksi dengan nilai-nilai,

norma, dan praktik budaya yang hidup di masyarakat. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi dasar pentingnya studi literatur ini. Dengan mengkaji berbagai temuan terdahulu, penelitian ini berusaha menyoroti bagaimana desentralisasi politik dan budaya daerah secara simultan berkontribusi terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih utuh dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada salah satu aspek (Rauf, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan pengaruh politik desentralisasi terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia, (2) mendeskripsikan peran budaya daerah dalam mendukung atau menghambat mutu pendidikan dasar, dan (3) menganalisis keterkaitan antara politik desentralisasi dan budaya daerah dalam menentukan kualitas pendidikan dasar.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berupaya memperkaya literatur mengenai hubungan kebijakan politik dan faktor budaya

dalam kajian mutu pendidikan dasar, sekaligus mengisi kekosongan kajian yang melihat keduanya dalam kerangka yang terpadu. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pendidik dan masyarakat dalam memahami pentingnya kolaborasi antara kebijakan politik dan budaya daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi memiliki implikasi nyata dalam praktik pembangunan pendidikan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi literatur dengan pendekatan kualitatif (Wahyudi et al., 2022). Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menganalisis dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh politik desentralisasi dan budaya daerah terhadap mutu pendidikan dasar. Studi literatur dipandang tepat karena

memungkinkan peneliti mengidentifikasi pengetahuan yang sudah ada, menemukan kesenjangan penelitian, serta memberikan gambaran komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Populasi penelitian adalah seluruh literatur akademik yang relevan dengan topik, meliputi artikel jurnal, buku, prosiding, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. (Khumaidi et al., 2024) Karena berbasis literatur, konsep “sampel” diterapkan dalam bentuk seleksi artikel yang memenuhi kriteria tertentu: (1) diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, (2) membahas isu desentralisasi pendidikan, budaya daerah, atau mutu pendidikan dasar, (3) diterbitkan oleh lembaga atau penerbit akademik yang kredibel. Artikel atau dokumen yang bersifat opini tanpa dasar ilmiah dikeluarkan dari analisis.

Instrumen penelitian berupa lembar telaah literatur yang disusun untuk mencatat informasi penting dari setiap artikel, mencakup identitas publikasi, metode, tujuan, temuan utama, dan relevansinya dengan topik (Asrulla et al., 2025). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Artikel yang lolos

seleksi ditelaah, kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama, dibandingkan antar penelitian, dan disintesis untuk menemukan pola serta keterkaitan. Triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil kajian akademik dengan laporan resmi pemerintah dan penelitian internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengaruh Politik Desentralisasi terhadap Mutu Pendidikan Dasar

Reformasi 1998 menandai perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Sistem sentralistik yang sebelumnya menempatkan seluruh kewenangan pendidikan di tangan pemerintah pusat digantikan oleh otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota. Pergeseran ini, sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah (Ridwan & Sumirat, 2021), memungkinkan daerah merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Otonomi daerah dapat meningkatkan mutu pendidikan

dasar karena kebijakan tidak lagi dipukul rata, melainkan menyesuaikan konteks daerah. Misalnya, distribusi guru di daerah kepulauan yang membutuhkan strategi transportasi khusus, atau penambahan kurikulum muatan lokal untuk mempertahankan identitas budaya. Namun, efektivitas otonomi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah. Seperti ditunjukkan dalam Evaluasi Dampak Kebijakan Desentralisasi Pendidikan (Khumaidi et al., 2024), banyak daerah menghadapi kesulitan karena keterbatasan manajemen dan birokrasi, sehingga otonomi tidak otomatis meningkatkan kualitas sekolah. Kesenjangan mutu semakin terlihat dari hasil asesmen nasional dan internasional. Data Rapor Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa hanya 61,53% siswa SD yang mencapai kompetensi literasi di atas standar minimal, sedangkan hasil PISA 2022 meski mengalami kenaikan peringkat, masih menempatkan Indonesia di bawah rata-rata OECD untuk literasi, matematika, dan sains. Hal ini menandakan bahwa desentralisasi belum efektif dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan dasar.

Desentralisasi membuka peluang inovasi kebijakan di tingkat lokal. Beberapa pemerintah daerah memanfaatkan kewenangan ini dengan baik, misalnya melalui penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan daerah atau pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu (Asrulla et al., 2025). Inovasi memperlihatkan bahwa daerah mampu mengaitkan kebijakan pendidikan dengan karakteristik sosial-budaya masyarakatnya.

Namun, variasi kebijakan antar daerah justru melahirkan kesenjangan. Kepala daerah dengan visi kuat dapat menghasilkan program yang berdampak signifikan, sedangkan di daerah lain kebijakan hanya berjalan secara administratif tanpa substansi. Misalnya, ada kabupaten yang menambahkan pelajaran seni tradisional dan bahasa lokal dalam kurikulum, sementara daerah lain hanya menjalankan kurikulum nasional tanpa adaptasi. Dalam konteks ini, faktor politik lokal sering kali lebih dominan dibandingkan kebutuhan pendidikan itu sendiri (Khumaidi et al., 2024). Beberapa daerah sudah mulai menggunakan data asesmen nasional dan Rapor Pendidikan untuk

memetakan kelemahan literasi dan numerasi di sekolah dasar. Langkah berbasis data ini menunjukkan praktik kebijakan yang lebih *evidence-based*, meskipun belum merata di seluruh daerah.

UU Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan minimal 20% APBD untuk sektor pendidikan. Secara nominal, anggaran pendidikan di banyak daerah sudah cukup besar. Namun, penelitian menunjukkan sebagian besar dana digunakan untuk belanja rutin, terutama gaji dan tunjangan guru, sedangkan belanja pembangunan dan peningkatan mutu relatif kecil (Wahyudi et al., 2022). Ketidakefisienan penggunaan anggaran ini membuat mutu pendidikan dasar stagnan. Meski sekolah tersedia hampir di seluruh wilayah, banyak yang masih kekurangan fasilitas laboratorium, buku, dan akses teknologi. Contoh nyata bisa dilihat dari Kabupaten Bandung, di mana APM SD mencapai 99,70% pada tahun 2023 (BPS Bandung, 2025). Artinya, hampir semua anak usia sekolah dasar sudah bersekolah, tetapi mutu belajar tetap rendah, tercermin dari capaian literasi yang belum memuaskan. Selain itu, politisasi anggaran sering terjadi.

Sebagian alokasi dana pendidikan digunakan untuk proyek seremonial atau pembangunan fisik yang kurang relevan, sementara program peningkatan kapasitas guru atau inovasi pembelajaran tidak mendapat perhatian memadai (Khumaidi et al., 2024). Hal ini memperlemah potensi desentralisasi fiskal sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan dasar.

Kepala daerah memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Kepala daerah yang visioner mampu menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Beberapa bupati berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memperbaiki sarana prasarana melalui dukungan politik yang kuat (Khumaidi et al., 2024). Sebaliknya, di daerah dengan kepemimpinan lemah, kebijakan pendidikan hanya dijalankan sebagai formalitas. Dinas pendidikan sebagai pelaksana sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sehingga fungsi pengawasan dan pembinaan mutu sekolah tidak berjalan optimal. Hal ini diperparah oleh adanya intervensi politik lokal dalam pengangkatan pejabat pendidikan, yang menyebabkan

profesionalisme birokrasi menurun. Politik desentralisasi memberi peluang besar bagi perbaikan mutu pendidikan dasar, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan kepala daerah, kapasitas birokrasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Tanpa faktor tersebut, desentralisasi justru memperlebar kesenjangan mutu antarwilayah.

Pengaruh Budaya Daerah terhadap Mutu Pendidikan Dasar

Budaya daerah di Indonesia sangat kaya dan beragam, mencakup nilai-nilai sosial seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan penghormatan pada orang tua. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam pendidikan dasar untuk memperkuat pendidikan karakter siswa. Penelitian di Kuantan Singingi, Riau, menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berbasis budaya lokal berhasil menanamkan sikap peduli, toleransi, dan kerja sama pada siswa sekolah dasar (Wahyuni & Dafit, 2024). Integrasi nilai lokal bukan hanya sebatas muatan tambahan dalam kurikulum, tetapi juga dapat meningkatkan iklim sekolah. Misalnya, budaya gotong royong bisa diimplementasikan melalui kegiatan

kerja bakti di sekolah, sementara nilai musyawarah bisa dipraktikkan melalui diskusi kelompok. Dengan cara ini, siswa belajar keterampilan sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pendidikan dasar tidak hanya menekankan aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter. Konteks nilai lokal juga terbukti meningkatkan motivasi belajar. Anak yang merasa nilai budayanya dihargai cenderung lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar, khususnya dalam aspek non-kognitif (Triyana & White, 2022).

Bahasa daerah merupakan identitas penting bagi banyak komunitas di Indonesia. Pada tahap awal pendidikan dasar, penggunaan bahasa ibu dapat membantu siswa memahami konsep-konsep dasar dengan lebih mudah. Anak-anak lebih cepat memahami materi bila disampaikan dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan prinsip pendidikan berbasis budaya yang menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam pembelajaran (Asrulla et al., 2025). Namun, dominasi bahasa daerah juga

bisa menjadi penghambat bila tidak diimbangi dengan penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Di beberapa wilayah terpencil, anak-anak yang terlalu lama terbiasa dengan bahasa daerah kesulitan memahami materi berbahasa Indonesia, sehingga capaian akademiknya menurun. Oleh karena itu, kebijakan bilingual yang menyeimbangkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Kebijakan ini sudah diimplementasikan di beberapa daerah, misalnya dengan penggunaan bahasa daerah di kelas I–II sekolah dasar, lalu secara bertahap memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Model transisi semacam ini dapat menjaga identitas budaya tanpa mengorbankan kemampuan akademik (Choi & Min, 2025).

Kearifan lokal memiliki potensi besar untuk membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Penelitian Green Chemistry and Cultural Wisdom menunjukkan bahwa integrasi prinsip kimia hijau dengan kearifan lokal Indonesia berhasil meningkatkan literasi sains siswa secara signifikan (Mashami et al., 2025). Hal ini memberi bukti empiris

bahwa pembelajaran berbasis budaya tidak hanya mendukung nilai karakter, tetapi juga dapat meningkatkan hasil akademik. Dalam konteks pendidikan dasar, guru dapat mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya, pelajaran IPA dapat dikaitkan dengan sistem pertanian tradisional, matematika dengan praktik perdagangan di pasar lokal, atau IPS dengan tradisi musyawarah desa. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami materi secara teoritis tetapi juga melihat relevansinya dalam kehidupan nyata. Kearifan lokal juga berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan formal dan kehidupan masyarakat. Hal ini penting agar siswa tidak merasa teralienasi oleh pendidikan yang terlalu abstrak atau jauh dari realitas sehari-hari (Asadullah et al., 2025).

Budaya gotong royong dan solidaritas sosial merupakan modal besar bagi pendidikan dasar di Indonesia. Partisipasi masyarakat dapat terlihat dari pembangunan fasilitas sekolah secara swadaya, dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, hingga keterlibatan dalam pengawasan pendidikan (Wahyudi et al., 2022). Masyarakat yang merasa memiliki sekolah

cenderung lebih aktif menjaga mutu pendidikan. Namun, budaya tidak selalu menjadi faktor pendukung. Beberapa tradisi justru menghambat akses dan mutu pendidikan. Di Toraja dan Madura, misalnya, pernikahan dini masih dianggap sebagai tradisi yang harus dipertahankan. Anak perempuan yang menikah muda terpaksa putus sekolah, sedangkan anak laki-laki yang sudah bekerja dianggap tidak perlu melanjutkan pendidikan (Bawono et al., 2022). Praktik semacam ini menurunkan angka partisipasi sekolah dan berdampak negatif pada mutu pendidikan dasar. Fenomena ini menegaskan bahwa budaya memiliki dua wajah: bisa menjadi modal sosial yang memperkuat pendidikan, tetapi juga bisa menjadi hambatan serius. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola budaya lokal secara selektif, mempertahankan nilai positif sambil mengurangi praktik yang kontraproduktif terhadap pendidikan.

Budaya daerah berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan dasar. Nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional dapat memperkaya pembelajaran dan membentuk karakter siswa, sementara bahasa daerah membantu pemahaman awal.

Namun, praktik budaya yang bertentangan dengan prinsip pendidikan modern, seperti pernikahan dini dan bias gender, berpotensi menurunkan mutu. Oleh karena itu, strategi pendidikan dasar harus mampu mengintegrasikan nilai budaya positif sekaligus mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh budaya tertentu.

Analisis Hubungan Politik Desentralisasi dan Budaya Daerah terhadap Mutu Pendidikan Dasar

1) Hubungan Positif

Politik desentralisasi dan budaya daerah dapat saling memperkuat bila dikelola dengan baik. Desentralisasi memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pendidikan sesuai dengan kondisi lokal, sementara budaya daerah menyediakan konten nilai, bahasa, dan kearifan yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Sinergi ini memungkinkan pendidikan dasar menjadi lebih kontekstual, relevan, dan bermakna. Sebagai contoh, penelitian di Kuantan Singingi memperlihatkan bahwa penerapan pendidikan multikultural berbasis budaya lokal mendorong pembentukan sikap toleransi, peduli, dan kerja sama pada siswa sekolah

dasar (Wahyuni & Dafit, 2024). Integrasi semacam ini hanya mungkin dilakukan jika pemerintah daerah memberi ruang dalam kurikulum melalui kebijakan otonomi pendidikan (Ridwan & Sumirat, 2021). Dengan kata lain, desentralisasi menjadi pintu masuk bagi penguatan budaya lokal dalam pendidikan dasar. Studi lain menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dengan sains modern, seperti pada penelitian tentang green chemistry and cultural wisdom, mampu meningkatkan capaian literasi ilmiah siswa (Mashami et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa budaya bukan hanya instrumen karakter, tetapi juga sarana peningkatan mutu akademik. Tanpa kewenangan desentralisasi, inovasi semacam ini sulit diterapkan secara luas. Hubungan positif ini juga tampak dalam peran masyarakat. Budaya gotong royong dapat dimobilisasi oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan sekolah dan kegiatan pendidikan. Partisipasi masyarakat memperkuat sense of belonging terhadap sekolah, sehingga mutu pendidikan dasar tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif komunitas (Afonso et al., 2024).

2) Hubungan Negatif

Meski berpotensi sinergis, interaksi antara politik desentralisasi dan budaya daerah tidak selalu menghasilkan dampak positif. Beberapa kondisi memperlihatkan hubungan yang kontraproduktif terhadap mutu pendidikan dasar.

a. Desentralisasi berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi mampu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pendidikan, sementara daerah dengan fiskal rendah kesulitan menyediakan sarana yang memadai (Khumaidi et al., 2024). Kesenjangan ini semakin diperparah bila budaya lokal tidak mendukung pendidikan, misalnya tradisi pernikahan dini di Madura atau Toraja yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah (Bawono et al., 2022).

b. Politik lokal sering memengaruhi alokasi anggaran pendidikan. Seperti ditunjukkan dalam Evaluasi Dampak Kebijakan Desentralisasi Pendidikan (Khumaidi et al., 2024), sebagian dana APBD pendidikan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, seperti proyek seremonial atau pencitraan

kepala daerah. Dalam konteks ini, desentralisasi yang seharusnya meningkatkan kualitas justru membuka ruang bagi praktik politisasi anggaran.

c. Budaya daerah yang terlalu dominan dapat menghambat penguasaan kompetensi nasional. Misalnya, penggunaan bahasa daerah tanpa transisi ke bahasa Indonesia dapat memperlambat penguasaan bahasa pengantar nasional. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan mengikuti kurikulum nasional dan menghadapi ujian berbasis standar nasional (Asrulla et al., 2025)

Data nasional mendukung ambivalensi hubungan ini. Rapor Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa meskipun APM SD di banyak daerah hampir mendekati 100% (contoh Kabupaten Bandung 99,70%), capaian literasi hanya sekitar 61,53% siswa SD yang berada di atas standar minimal. Hal ini membuktikan bahwa akses yang luas tidak otomatis berbanding lurus dengan mutu belajar. Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa meski Indonesia naik beberapa posisi dibanding tahun 2018, capaian tetap rendah dibanding negara ASEAN lain seperti Vietnam dan

Malaysia. Artinya, meskipun desentralisasi memberi peluang kebijakan lokal dan budaya lokal memberi konteks pembelajaran, mutu pendidikan dasar belum mampu mencapai standar global.

Hubungan politik desentralisasi dan budaya daerah terhadap mutu pendidikan dasar bersifat ambivalen. Di satu sisi, sinergi keduanya dapat memperkuat pendidikan dengan menghadirkan pembelajaran kontekstual, relevan, dan berakar pada identitas budaya. Namun di sisi lain, kombinasi antara kelemahan birokrasi daerah, politisasi anggaran, dan budaya negatif seperti pernikahan dini justru memperlemah mutu pendidikan dasar. Karena itu, yang menentukan bukan sekadar adanya desentralisasi atau keberagaman budaya, tetapi bagaimana kedua faktor tersebut dikelola. Desentralisasi harus dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan berbasis data, sementara budaya daerah harus diseleksi agar nilai positif diperkuat dan nilai negatif diminimalisasi. Dengan pendekatan ini, sinergi politik desentralisasi dan budaya dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah Desentralisasi pendidikan pascareformasi membuka ruang bagi daerah untuk merancang kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Otonomi daerah memberi fleksibilitas dalam distribusi guru, pengembangan kurikulum, dan pengelolaan anggaran. Namun, mutu pendidikan dasar tidak otomatis meningkat karena masih bergantung pada kapasitas birokrasi, kualitas kepemimpinan kepala daerah, dan efektivitas pengelolaan APBD. Beberapa daerah mampu memanfaatkan otonomi untuk meningkatkan akses dan mutu, tetapi sebagian besar masih menghadapi kendala politisasi anggaran, kesenjangan fiskal, dan lemahnya tata kelola. Budaya daerah berperan ganda dalam pendidikan. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi dapat memperkuat pendidikan karakter serta meningkatkan motivasi belajar. Bahasa daerah membantu siswa memahami konsep awal, dan kearifan lokal membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Namun, budaya tertentu justru menghambat pendidikan, seperti tradisi pernikahan

dini, bias gender, atau dominasi bahasa lokal tanpa transisi ke bahasa Indonesia. Dengan demikian, budaya daerah dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat pendidikan, tetapi juga bisa menjadi hambatan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Desentralisasi dan budaya daerah memiliki hubungan ambivalen. Keduanya dapat saling memperkuat bila kebijakan daerah mengintegrasikan nilai budaya positif dalam kurikulum dan melibatkan masyarakat melalui partisipasi aktif. Namun, keduanya juga bisa saling melemahkan bila desentralisasi tidak didukung tata kelola yang baik dan budaya negatif tetap dipertahankan. Data nasional menunjukkan bahwa meski angka partisipasi sekolah dasar hampir universal, capaian literasi dan numerasi masih rendah, menandakan bahwa akses luas belum berbanding lurus dengan mutu belajar. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dasar hanya dapat dicapai bila desentralisasi dikelola secara transparan dan berbasis data, sementara budaya lokal dimanfaatkan secara selektif untuk memperkuat karakter dan relevansi pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A., Tovar Jalles, J., & Venâncio, A. (2024). Fiscal decentralization and public sector efficiency: Do natural disasters matter? *Economic Modelling*, 137(August 2023). <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106763>
- Alimuddin, Haliza, S. N., Tiga, I. P., & Alim, M. N. (2025). Desentralisasi Pendidikan Dan Pembiayaan: Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Akses Dan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(2), 3031–5220.
- Asadullah, M. N., Jilani, A. H., Negara, S. D., & Suryadarma, D. (2025). Improving the quality of basic education in ASEAN–Emerging challenges and reforms. *International Journal of Educational Development*, 116(May), 103292. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2025.103292>
- Asrulla, A., Rosadi, K. I., Jeka, F., Saksitha, D. A., & Wahyuni, D. (2025). Kontribusi Aspek Sosial Dan Budaya Dalam Aplikasi Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia. *Jurnal JIPDAS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar)*, 5(1), 404–423. <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i1.2579>
- Bagus Setiawan, A. N., & Maunah, B. (2023). Dasar Dasar History Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 17(1), 69–84.

- <https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.816>. Dasar
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Choi, S., & Min, I. (2025). The impact of cognitive and non-cognitive skills on occupational outcomes: Evidence from Indonesia. *International Journal of Educational Research*, 133(July), 102669. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102669>
- Durotun Nasihah, Anis Fauzi, & Abdul Muin. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan. *Qalam : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 12(1), 19–27. <https://doi.org/10.33506/jq.v12i1.2238>
- Khumaidi, A., Hamdani, U. L., & Baharuddin. (2024). Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(4), 468–481. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v5i4.16859>
- Mashami, R. A., Ahmadi, & Pahriah. (2025). Green chemistry and cultural wisdom: A pathway to improving scientific literacy among high school students. *Social Sciences and Humanities Open*, 11(December 2024), 101653. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101653>
- Nurhuda. (2022). *Landasan Pendidikan*. Ahlimedia Press.
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*. NusaMedia Yogyakarta.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA,"* 7(1), 87–110. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v2i1.85>
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1), 118–127. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>
- Triyana, M., & White, J. S. (2022). Non-monetary incentives for tobacco prevention among youth in Indonesia. *Journal of Health Economics*, 83(September 2020), 102620. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2022.102620>
- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Putra Dinata, Z., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 18–22.

<https://doi.org/10.69966/mjemias.v1i1.3>

Wahyuni, S., & Dafit, F. (2024). Pendidikan multikultural untuk nilai-nilai budaya daerah siswa di sekolah dasar. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 630–637.

<https://doi.org/https://doi.org/10.29210/xxxxx> Contents

Angka partisipasi murni pendidikan dasar (SD) di Kabupaten Bandung untuk tahun 2023 mencapai sekitar 99,70%.

https://bandungkab.bps.go.id/id/news/2025/02/20/208/angka-partisipasi-murni--apm-.html?utm_

Hasil Asesmen Nasional (AN) 2022 / Rapor Pendidikan Indonesia 2023 menunjukkan persentase siswa SD.

<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/0kpP4LRk-data-rapor-pendidikan-dan-pisa-mesti-digunakan-untuk-tingkatkan-kualitas>

PISA 2022, literasi membaca di Indonesia naik 5 posisi dibandingkan 2018, matematika juga naik 5 posisi, sains naik 6 posisi

<https://dikdasmen.kemdikbud.go.id/media-berita/peringkat-indonesia-pada-pisa-2022-naik-5-6-posisi-dibanding-2018>